

**Analisis Wacana Kritis Model Fairclough
pada Pidato Sri Sultan HB X
dalam Rangka Peringatan Satu Dasawarsa UU Keistimewaan DIY**

Sri Suharti¹, Rifqi Risnadyatul H.², Nani Purwati³

^{1,3}Universitas Bina Sarana Informatika

²Universitas Negeri Malang

Posel : sri.rsh@bsi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara bahasa dan struktur sosial budaya pada teks pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Fairclough. Dimensi analisisnya mencakup teks, praktik wacana, sosial budaya sesuai kerangka analisis Fairclough. Dimensi-dimensi tersebut menghubungkan mulai tingkat teks hingga tingkat praktik sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sri Sultan HB X ingin menggambarkan Yogyakarta memiliki kelayakan hidup yang baik walaupun Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Selain itu, Sri Sultan HB X bermaksud memberi gambaran kepada publik bahwa masyarakat Yogyakarta tetap memandang nilai-nilai budaya Jawa serta adaptif terhadap perubahan. Representasi tindakan sosial budaya untuk meneguhkan keistimewaan Yogyakarta ditunjukkan melalui upaya adaptasi budaya dan tradisi terhadap nilai-nilai baru. Sosok Sri Sultan HB X sebagai kepala daerah dan raja ditunjukkan agar pidato yang disampaikan selalu didengar oleh rakyatnya.

Kata Kunci: Sri Sultan, keistimewaan, budaya, pidato, wacana kritis

*Fairclough's Critical Discourse Analysis on Sri Sultan HB X's Speech
in the Commemoration of the One Decade of the DIY Privileges Law*

Abstract: This study aims to examine the relationship between language and socio-cultural structure in the text of Sri Sultan HB X's speech on the one-decade anniversary of Yogyakarta's specialness. This research is qualitative with Fairclough's critical discourse analysis method. The dimensions of the analysis include text, discourse practices, social culture according to Fairclough's analytical framework. These dimensions connect from the level of the text to the level of socio-cultural practices. The results showed that Sri Sultan HB X wanted to describe Yogyakarta have a good standard of living even though Yogyakarta has a high poverty rate. In addition, Sri Sultan HB X intends to illustrate to the public that the people of Yogyakarta still view Javanese cultural values and are adaptive to change. Representation of socio-cultural actions to reinforce the privileges of Yogyakarta is shown through efforts to adapt culture and traditions to new values. The figure of Sri Sultan HB X as the regional head and king was shown so that the speeches delivered were always heard by the people.

Keyword : Sri Sultan, privileges, culture, speech, critical discourse

PENDAHULUAN

Yogyakarta sebagai provinsi yang berstatus istimewa diatur berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Keistimewaan tersebut dalam hal pengisian jabatan, kepala daerah, kelembagaan pemerintahan, serta kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang (Thontowi, 2019). Keistimewaan ini kemudian diperingati secara formal. Pada peringatan satu dasawarsa

keistimewaan Yogyakarta, Sri Sultan HB X menyampaikan pidato resmi mengenai keistimewaan Yogyakarta dan upaya-upaya meneguhkan keistimewaan. Dalam pidatonya, Sri Sultan HB X banyak membahas mengenai modernisasi budaya termasuk penguatan ekonomi sosial budaya tingkat desa/lokal. Modernisasi budaya tidak hanya terkait dalam bidang sosial budaya, tetapi juga politik. Menurut Surahman (2020), modernisasi budaya terkait bidang politik antara lain adalah pemberian gelar Mangkubumi bagi Putri Sulung Sri Sultan HB X yang merepresentasikan emansipasi persamaan hak laki-laki dan perempuan dan upaya transformasi Keraton Yogyakarta menjadi sebagai institusi monarki yang modern. Pada pidato peringatan keistimewaan Yogyakarta tersebut, modernisasi budaya oleh Sri Sultan HB X lebih ditujukan terkait bidang budaya, bukan politik.

Muatan topik modernisasi budaya yang terkait politik dalam pidato resmi Sri Sultan HB X akan dapat menimbulkan pro kontra baik secara politik ataupun budaya sehingga tidak secara eksplisit dikemukakan dalam pidatonya. Aspek politik yang dikemukakan Sri Sultan HB X pun terfokus pada demokrasi lokal pada tingkat desa/*kalurahan* serta tatanan ekonomi lokal desa. Tema modernisasi budaya dalam pidato Sri Sultan HB X tersebut lebih memfokuskan adaptasi budaya Jawa terhadap kondisi sosial masyarakat terkini. Budaya juga memiliki dampak secara sosial ekonomi bagi masyarakat. Tentunya, modernisasi budaya memiliki pengaruh sosial ekonomi bahkan termasuk cara pandang baru/penyesuaian ideologi pada suatu budaya terhadap pola hidup masyarakat. Selain itu, aspek ekonomi sosial yang dikemukakan oleh Sri Sultan HB X dalam pidatonya itu perlu ditelaah lebih lanjut dengan perspektif kritis. Jika melihat aspek ekonomi sosial secara makro di Yogyakarta dan membandingkan dengan tingkat pembangunan manusia di Yogyakarta, akan ditemukan relasi yang kontradiktif. Menurut Salsabilla dkk. (2022), indeks pembangunan manusia yang tinggi di Yogyakarta tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta. Hal ini karena lebih banyak lapangan kerja yang tersedia di Yogyakarta ada pada sektor pertanian yang tidak memerlukan pendidikan lebih tinggi. Dalam pidatonya pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta ini, Sri Sultan HB X mengungkapkan perspektif berbeda tentang kemiskinan. Menurutnya kemiskinan tidak bisa dilihat dari faktor ekonomi saja. Tentunya pernyataan tersebut dapat menjadi salah satu bagian wacana dari pidato tersebut. Hal-hal tersebut dapat dianalisis dengan perspektif kritis untuk menemukan makna potensial ataupun muatan ideologi tertentu.

Secara sosial budaya, Yogyakarta masih kental dengan politik dan budaya Jawa serta adanya eksistensi Keraton Yogyakarta yang diperkuat dengan hadirnya undang-undang keistimewaan. Sri Sultan HB X yang berkedudukan sebagai gubernur dan raja tentunya memiliki kedudukan kuat dan diakui baik secara sosial, politik, budaya, ataupun pengaruhnya terhadap ekonomi. Pidato yang disampaikan oleh Sri Sultan HB X dalam peringatan keistimewaan Yogyakarta dapat sebagai bentuk wacana terhadap publik utamanya warga masyarakat Yogyakarta. Menurut Apriliani (2022), Sri Sultan HB X memiliki kesan sakral serta citra Sri Sultan HB X yang membuat apa yang dikatakan selalu didengarkan oleh rakyatnya. Selain itu menurut Surahman (2020), Sri Sultan HB X memiliki kekuasaan penuh secara politik terhadap seluruh wilayah dan rakyat Yogyakarta.

Wacana dan analisisnya dapat digunakan untuk menelaah pidato Sri Sultan HB X dengan perspektif kritis. Wacana memiliki bentuk lisan ataupun tulis. Pada wacana lisan, komunikasi melibatkan penutur dan mitra/lawan tuturnya. Adapun pada wacana tulis, melibatkan penulis dan pembacanya. Baik secara lisan atau tulis, wacana yang dimuat seringkali ditujukan kepada khalayak umum seperti warga masyarakat. Analisis wacana kritis ini diharapkan dapat menelaah makna atau ideologi yang terkandung dalam pidato seseorang. Sara Mills (2004) mengemukakan bahwa wacana membangun cara pandang,

representasi pengalaman sebagai sebuah ideologi. Suatu pidato akan memunculkan wacana ketika dilihat sebagai media untuk memengaruhi, mengajak/membujuk, termasuk menjelaskan sesuatu hal atau program sehingga pendengar/pembaca cenderung akan memihak penutur pidato. Luhukay (2007) menjelaskan bahwa pidato menuntut instrumen utama yaitu kepandaian berbicara seseorang untuk memengaruhi orang lain secara meyakinkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas sebelumnya, penelaahan secara lebih mendalam dengan perspektif wacana kritis pada pidato Sri Sultan HB X dalam peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta itu perlu dilakukan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Fairclough untuk menelaah wacana atau makna potensial dalam pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta di Bangsal Kepatihan yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.

LANDASAN TEORI

Bahasa dan Representasi dalam Pidato

Bahasa baik pilihan kata maupun struktur gramatiknya, membawa makna ideologi tertentu dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan sesuai dengan kepentingan pemakai bahasa (Eriyanto, 2015). Bahasa dalam pandangan kritis merupakan suatu representasi yang berperan membentuk subjek, tema-tema wacana, maupun strategi di dalamnya. Menurut Bourdieu dalam Haryatmoko (2016), bahasa bukan semata sebagai alat komunikasi, melainkan lebih dari itu sebagai instrumen kekuasaan. Bahasa digunakan untuk memengaruhi sikap sebuah masyarakat terhadap tujuan atau posisi tertentu. Bahasa juga biasa digunakan sebagai sarana politik untuk menyampaikan pesan ataupun propaganda kepada publik. Bahkan menurut Ayuningtias & Hartanto (2014), bahasa tidaklah netral namun memuat elemen-elemen ideologi untuk tujuan tertentu.

Menurut Aeni & Ahmadi F (2021), pidato merupakan bentuk komunikasi formal antara pihak/seseorang yang akan menyampaikan suatu hal tertentu atau informasi kepada pendengar seperti masyarakat umum. Pidato dianggap sebagai wacana ketika suatu pidato digunakan sebagai media untuk memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu, termasuk visi misi tertentu ataupun program kerjanya (Helena, Yulianto, & Kisyani, 2021). Penyebarluasan ide pikiran dapat dilakukan melalui bahasa dalam pidato, bahkan bertujuan untuk mengkonstruksi pikiran pendengar sehingga menerima ataupun mematuhi gagasan atau pesan informasi yang disampaikan. Menurut Afriansyah (2017), bahasa digunakan untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik termasuk untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil. Jadi bahasa seseorang dalam suatu pidato dapat dikatakan sebagai upaya memengaruhi orang lain untuk mengikuti kehendak seseorang yang berpidato.

Bahasa dalam suatu pidato sebenarnya dapat merepresentasikan sesuatu hal. Bahasa akan merepresentasikan asosiasi atau nilai tertentu, tindakan maupun peristiwa tertentu. Representasi menurut Busri (2009) ialah penggambaran tentang individu ataupun kelompok, entitas, termasuk tindakan atau kegiatannya yang ditampilkan serta digambarkan pada suatu teks. Penggambaran akan teks dapat dilihat dari beberapa aspek. Representasi tersebut dapat dilihat dari aspek kosakata, tatabahasa, kalimat/anak kalimat dan rangkaian antar kalimat, serta penonjolan bagian penting dalam teks (Fairclough, 1995).

Analisis Wacana Kritis

Teks dipandang sebagai praktik nilai-nilai dan pencerminan misi tertentu (Eriyanto, 2015). Dalam analisis wacana kritis Fairclough, teks sebagai dimensi mikro berhubungan dengan konteks masyarakat sebagai dimensi makro. Menurut Fairclough, analisis wacana

memiliki andil dalam analisis sosial sehingga analisis teks dikombinasikan dengan konteks yang lebih luas yaitu konteks dalam masyarakat. Pada analisis wacana kritis Fairclough ini, bahasa dilihat sebagai praktik sosial, pembentukan bahasa pun terkait relasi dan konteks sosial tertentu. Menurut Tamrin (2019), wacana dikemas dengan berbagai maksud melalui berbagai bentuk opini, pendapat, ataupun pikiran.

Menurut Fairclough (1996), bahasa merupakan wacana yang mempunyai tiga implikasi. Pertama, wacana tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dijelaskan juga oleh Akmaluddin (2019) bahwa penggunaan bahasa membentuk wacana yang berpengaruh terhadap masyarakat serta ditentukan juga oleh masyarakat. Kedua, wacana merupakan praktik sosial sehingga wacana merupakan suatu proses sosial. Ketiga, wacana itu pun berproses sesuai dengan kondisi pada masyarakat. Aswadi (2018) mengatakan bahwa dominasi terhadap kelompok tertentu pada proses komunikasi dalam masyarakat merupakan hal utama yang dianalisis dalam perspektif kritis. Analisis wacana kritis menurut Fairclough (1996) ini mencakup tiga dimensi yaitu teks (mikrostruktur) terkait dengan analisis alat kebahasaan, praktik wacana (mesostruktur) terkait bentuk produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosial budaya (makrostruktur) terkait praktik-praktik baik secara sosial maupun budaya dalam suatu masyarakat tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis ini difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait. Aspek kebahasaan dapat digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Sumber data yang akan analisis adalah pidato. Sumber data yang akan diteliti adalah pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui transkripsi rekaman video pidato di youtube ke dalam bentuk tulisan. Data berupa teks pidato yang merupakan hasil transkripsi video pidato Sri Sultan HB X. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis wacana model Fairclough. Pada penelitian ini, instrumen disusun untuk memudahkan dalam penganalisisan teks, diskursus, dan sosiokultural sesuai model Fairclough. Dimensi analisis wacana kritis ini mencakup teks, praktik wacana, sosial budaya sesuai kerangka analisis Fairclough. Dimensi-dimensi tersebut menghubungkan mulai tingkat teks hingga tingkat praktik sosial budaya sehingga muatan ideologis pada suatu teks dapat diketahui (Fairclough, 1996).

PEMBAHASAN

Bahasa merupakan kunci penyampaian informasi baik melalui pidato resmi, media massa, dan bahkan media sosial daring (Supradi, Simanjuntak, & Yusrah, 2020). Pemakaian bahasa dalam suatu pidato resmi memunculkan suatu wacana yang perlu ditelaah secara kritis. Analisis kritis Fairclough ini diterapkan pada baik dimensi teks, praktik wacana, maupun sosial budaya untuk menelaah wacana atau makna potensial dalam pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta di Bangsal Kepatihan yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.

Representasi Teks Pidato

Dimensi ini menganalisis alat kebahasaan yang digunakan pada pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta yang ditayangkan secara daring di saluran youtube pemerintah provinsi DIY. Analisis ini dilakukan menyeluruh pada pidato

Sri Sultan HB X tersebut baik pada bagian pembukaan/awal, isi, dan penutup.

Pada awal pidato, Sri Sultan secara lugas menyampaikan tema modernisasi budaya dan aktualisasi kelurahan. Pidato ini disampaikan pada *Sapa Aruh* menyambut satu dasawarsa UU Keistimewaan DIY.

Assalamu'alaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan, saya perlu memberitahukan bahwa *sapa aruh* dalam kesempatan ini untuk menyambut satu dasawarsa UUK. Saya mencoba untuk menyampaikan materi memodernisasi budaya, mengaktualisasi *kalurahan* sebagai *gapuraning mulyoprojo*.

(DATA 1)

Penggunaan kosa kata *modernisasi budaya* menunjukkan perlunya dan pentingnya modernisasi budaya di tengah era modern, jadi tidak hanya terpaku pada romantisme budaya. Dalam hal kebudayaan, tantangan terbesar adalah pemertahanan budaya lokal di Yogyakarta supaya tradisi dan modernisasi dapat berjalan seiring tanpa saling menggerus. Upaya yang konsisten dan matang diperlukan agar budaya dan tradisi tetap dapat dilestarikan, tentunya upaya ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Kristianto & Kuswarsantyo (2020), pemertahanan tradisi tidak boleh hanya sebagai seremoni saja namun mampu teraktualisasikan pada kebijakan dan Sri Sultan memunyai tugas menjaga kebudayaan serta sebagai pemimpin spiritual. Pada kalimat terakhir teks pidato di atas, Sri Sultan HB X menekankan pentingnya aktualisasi *kalurahan* (desa) sebagai pintu gerbang kemakmuran dan meneguhkan pengaruh institusi Keraton Yogyakarta baik sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya pada bagian isi pidato, pembicara menyampaikan secara rinci mengenai tema atau topik utama baik secara lugas ataupun tersamar. Bagian isi pidato diatur dan disusun sehingga makna atau pesan dapat disampaikan secara jelas dan mampu memengaruhi pihak yang menyimak atau mendengarkan suatu pidato.

"Hari ini, 31 Agustus 2022, tepat satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Diterbitkannya Undang-Undang tersebut, bersumber dari peristiwa bersejarah saat Daerah Yogyakarta di bawah pemerintahan dua kerajaan *mardika* me-mandat-kan diri bergabung dengan RI yang masih muda dalam sebuah *ijab qabul* kebangsaan.

Peristiwa sejarah *ijab qabul* itu digambarkan sebagai adanya pihak yang menyerahkan—dalam hal ini Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII mewakili Nagari Ngayogyakarta dan Paku Alaman, dan pihak penerima—Ir Soekarno selaku Presiden RI, yang kemudian oleh Presiden diberikan mahar atau mas kawin berupa Daerah Setingkat Provinsi yang Bersifat Istimewa.

(DATA 2)

Dari kutipan tersebut, penggunaan kosa kata *pemerintahan dua kerajaan mardika* menunjukkan bahwa Sri Sultan HB X bermaksud mengingatkan bergabungnya Yogyakarta ke Indonesia melalui kesepakatan antara kerajaan merdeka Yogyakarta dan negara Indonesia pada saat itu. Hal ini yang mendasari terbentuknya keistimewaan Yogyakarta saat ini.

Dan dalam upaya meningkatkan marwah Keistimewaan di usia Dasawarsa-nya, perlu bagi kita untuk memperingati UUK DIY dengan berpikir reflektif. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan segenap rakyat DIY dalam basis budaya, melalui penguatan upaya-upaya partisipatif-demokratis, menuju tataran "Pancamulia", selaras dengan agenda prioritas Reformasi *Kalurahan*, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi".

(DATA 3)

Sesuai kutipan pidato di atas, penggunaan kata *kita* bukan *saya* berarti Sri Sultan HB X ingin agar seluruh warga masyarakat Yogyakarta, bukan hanya jajaran Keraton, pemerintah daerah, dan birokrasinya saja, berpikir reflektif. Kata *reflektif* yang dimaksud memiliki tujuan yang dijelaskan pada kalimat lanjutannya. Pada kalimat lanjutan tersebut terdapat kosa kata *penguatan upaya*. Penggunaan kosa kata *penguatan upaya* menunjukkan perlu adanya upaya/program kerja yang lebih kuat, terencana, dan terukur melibatkan pemerintah daerah. Tujuan yang dimaksudkan adalah meningkatkan ekonomi berbasis budaya.

Kemudian dalam pidatonya sesuai kutipan di bawah ini, Sri Sultan menggunakan kosa kata *media transformasi* yang berarti budaya Jawa pun harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru. Dalam pidatonya tersebut Sri Sultan HB X berupaya mengajak agar pemikirannya tentang konsep *transformasi* dapat diaktualisasikan. Hal ini sejalan dengan teks pidato bagian sebelumnya pada kosa kata *upaya partisipatif-demokratis*.

Sri Sultan HB X secara khusus menyebutkan konsep pendidikan yang *built in* atau *embodied*. Menurut Francesconi & Tarozzi (2019), pendidikan yang *embodied* ialah suatu konsep pendidikan yang mendukung transformasi pengalaman pendidikan menjadi pengalaman hidup. Dalam hal budaya, Triyanto dkk (2019) menyebutkan bahwa pendidikan budaya sangat terkait dengan pembangunan karakter sebab sebagian nilai-nilai karakter terkandung pada pendidikan budaya. Sri Sultan HB X berharap konsep pendidikan *embodied* atau *built in* tersebut dapat diterapkan untuk menyebarkan dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai tradisi, budaya; mengasah ketajaman akal budi; serta beradaptasi dengan kondisi sosial masa kini.

Warga Yogyakarta yang saya banggakan,
Penyebaran Kebudayaan Keistimewaan haruslah melalui proses pendidikan sebagai media transformasinya. Sehingga diperlukan konsep pendidikan dan pembelajaran—baik formal maupun informal—yang *built-in* atau *embodied* dalam kebudayaan.
Dalam hal ini, Keistimewaan dapat berperan sebagai moderator antara nilai-nilai budaya yang telah tersemat di masyarakat, untuk kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai baru melalui pembelajaran, selaras dengan gageget Mangasah Mingising Budi.

(DATA 4)

Sesuai kutipan teks pidato di bawah ini, Sri Sultan HB X melanjutkan pidatonya tentang sosial ekonomi masyarakat. Dalam pidatonya, Sri Sultan menyebutkan bahwa *kemiskinan janganlah dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka*. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa Sri Sultan HB X tidak setuju kemiskinan diukur dari faktor ekonomi saja. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah DIY, Yogyakarta masih menjadi provinsi paling miskin di Jawa.

Jika hanya berdasarkan faktor ekonomi, Yogyakarta tidak lebih baik dibanding provinsi lainnya di Jawa. Namun walaupun kemiskinan di Yogyakarta tinggi, kondisi kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Bahkan Pemerintah Provinsi DIY (2023) pun menyebutkan meskipun menjadi provinsi paling miskin di Jawa, namun memiliki harapan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan sosial, tingkat lama sekolah yang baik bahkan beberapa parameter tersebut tertinggi di Indonesia.

Perihal sosial-ekonomi misalnya. Perlu bagi kita menilik peran budaya, sebagai solusi pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan permasalahan yang terjadi di *kalurahan*.

Idealnya, kemiskinan janganlah dilihat dari sudut pandang ekonomi belaka. Tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng-*update* nilai-nilai *gemi, nastiti, ngati-ngati* selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis, yang seharusnya disuntikkan dalam setiap sendi pelaksanaan Keistimewaan.

(DATA 5)

Sri Sultan HB X mengatakan perlunya moderasi pendidikan khususnya pendidikan karakter, hal ini sejalan dengan konsep pendidikan *embodied* atau *buit in* yang dimaksudkan pada teks pidato sebelumnya. Konsep pendidikan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan zaman modern termasuk kondisi sosial ekonomi masa kini.

Selanjutnya dalam pidatonya sesuai kutipan di bawah ini, Sri Sultan HB X mengungkapkan bahwa fungsi *kalurahan* baik politik, ekonomi, ataupun pendidikan. Kata *mengingatkan* pada kutipan di bawah ini, dapat diartikan sebagai perlunya aktualisasi tindakan nyata untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, tidak hanya konsep belaka. Sebagai contoh pada bidang demokrasi politik lokal tingkat desa/*kalurahan*, perlu upaya kesadaran politik sehingga tercipta politik lokal yang demokratis dan mampu mewujudkan terciptanya tataran ekonomi lokal yang baik bagi desa/*kalurahan*.

Warga Yogyakarta yang saya banggakan,

Di kesempatan yang baik ini pula, saya mengingatkan komitmen mewujudkan *kalurahan* sebagai patrap TriMuka, yaitu: menjadikan *kalurahan* Arena Demokrasi Politik Lokal sebagai wujud Kedaulatan Politik; Arena Demokratisasi Ekonomi Lokal sebagai wujud Kedaulatan Ekonomi; dan pemberkuasaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif Warga *Kalurahan* sebagai wujud Kedaulatan Data. Kesemuanya yang tertera itu, hendaknya janganlah hanya berhenti pada teks tanpa konteks.

(DATA 6)

Pada pidato selanjutnya sesuai kutipan di bawah ini, terdapat kata *meyakini* dan *dilancarkan* serta *niscaya* pada kalimat pertama. Pemilihan kata tersebut dapat diartikan sebagai keinginan serta harapan Sri Sultan HB X agar desa/*kalurahan* dapat berperan penting pemberantasan kemiskinan. Dengan kata lain, Sri Sultan HB X mengharapkan desa/*kalurahan* dapat berperan sebagai ujung depan upaya memberantas kemiskinan dan mempercepat pembangunan yang menyeluruh di desa-desa DIY. Hal ini sejalan dengan filosofi *gapuraning mulyoprojo* pada teks pidato sebelumnya. Pada kalimat terakhir kutipan di bawah ini, *kalurahan* merupakan *basis keistimewaan*. Hal ini berarti desa/*kalurahan* merupakan objek utama pelaksanaan keistimewaan yang juga akan semakin meneguhkan posisi Sri Sultan HB X baik sebagai raja ataupun gubernur.

Saya meyakini, jika potensi keunggulan dilancarkan dari *kalurahan*, niscaya *kalurahan* akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemberantasan kemiskinan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan *kalurahan*, dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya itu toh berada di *kalurahan*. Kesemuanya itu bermuara pada: Reformasi *Kalurahan* sebagai Basis Keistimewaan DIY.

(DATA 7)

Selanjutnya pada kutipan di bawah ini, Sri Sultan HB X menyebutkan kata *keragaman* dalam hal adat istiadat, *living tradition* serta kreativitas. Berdasarkan pemilihan kata tersebut

dapat diartikan bahwa Sri Sultan HB X berharap agar budaya termasuk di dalamnya adat istiadat dan tradisi berkehidupan dapat dikolaborasikan dengan kreativitas yang baik menjadikan keistimewaan Yogyakarta ada dalam benak masyarakat Yogyakarta.

Selaras dengan hal tersebut, kegemilangan predikat istimewa akan semakin bermakna, seiring keragaman yang tercipta dalam kreativitas, adat istiadat, serta *living traditon* masyarakat Yogyakarta, serta sumbangsih seluruh masyarakatnya. Bahwa untuk memberi sumbangsih dan menjadi wong Jogja, tidaklah harus lahir di Jogja dan atau memiliki darah keturunan Jawa. Sudah semestinya, keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja, adalah menjadi Indonesia.

(DATA 8)

Pada kalimat kedua pada kutipan di atas, Sri Sultan HB X menyebutkan *bahwa menjadi wong Jogja, tidaklah harus lahir di Jogja dan atau memiliki darah keturunan Jawa*. Hal itu dapat diartikan bahwa siapa pun dapat berkontribusi untuk Yogyakarta dan memiliki kesempatan yang sama di Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri Sultan HB X tidak bersifat etnosentris, dan apakah mungkin jika Yogyakarta maju jika hanya dibangun oleh internal orang Yogyakarta sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sri Sultan HB X pada kalimat terakhir kutipan di atas, yang menegaskan bahwa *menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia*. Frasa tersebut berarti membangun Yogyakarta pun tidak bisa jika hanya dilakukan oleh orang Yogyakarta sendiri, namun berbagai pihak atau kalangan di Indonesia yang ingin membangun Yogyakarta.

Kemudian pada bagian penutup pidato, pidato diselesaikan dengan mengucapkan kata penutup. Sri Sultan HB X menutup pidatonya dengan menyampaikan harapan dan doa dalam pidatonya. Sesuai kutipan di bawah ini, harapan yang diucapkan Sri Sultan HB X merupakan bentuk halus dari instruksi dan ajakan agar keistimewaan benar-benar dirasakan oleh rakyat Yogyakarta.

Dan jika memang demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan bekah dan rahmat-Nya, agar Satu Dasawarsa UUK DIY semakin mampu memberi manfaat bagi segenap lapisan masyarakat DIY serta Bangsa dan Negara. Dirgahayulah Jogja-Istimewa dan Rakyatnya, dalam merayakan Satu Dasawarsa berlakunya UUK DIY tepat hari ini.

(DATA 9)

Relasi

Relasi berarti hubungan antara penyusun teks dengan khalayak dan partisipan (Munfarida, 2014). Pihak yang memberikan pidatonya yaitu Sri Sultan HB X yang berkedudukan baik sebagai gubernur dan raja memiliki relasi/hubungan dengan khalayak dan partisipan seperti warga masyarakat Yogyakarta. Dalam pidatonya tersebut, Sri Sultan banyak menekankan aspek budaya dan ekonomi. Sri Sultan HB X mengajak, dan menginstruksikan kepada warga Yogyakarta untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan baik untuk aspek budaya ataupun ekonomi. Tentunya upaya-upaya tersebut perlu kerja nyata, kontribusi, dan partisipasi baik jajaran pemerintahan maupun masyarakat Yogyakarta. Sri Sultan bermaksud memberikan instruksi dan ajakan baik posisinya sebagai kepala pemerintahan daerah yang memiliki kekuatan politik dan administratif maupun sebagai raja yang memiliki modal sosial budaya. Sri Sultan HB X dalam pidatonya terlihat ingin memberikan representasi bahwa Yogyakarta sebagai daerah dengan budaya dan tradisi yang dijaga namun bersifat dinamis seiring perkembangan zaman, masyarakatnya mampu beradaptasi dan bertransformasi dengan konteks kekinian namun tetap menjaga tradisi dan

adat istiadat.

Identitas

Identitas yang ditampilkan melalui suatu pidato perlu diungkap pada penelitian ini. Berdasarkan analisis pada pidato Sri Sultan HB X dalam peringatan satu dasawarsa keistimewaan, terlihat identitas Sri Sultan HB X yang mempunyai posisi kepala daerah dengan otoritas tertinggi di Yogyakarta terlebih berkedudukan sebagai raja Keraton Yogyakarta yang diakui menurut UU Keistimewaan.

Di kesempatan yang baik ini pula, saya mengingatkan komitmen mewujudkan *kalurahan* sebagai patrap TriMuka, yaitu: menjadikan *kalurahan* Arena Demokrasi Politik Lokal sebagai wujud Kedaulatan Politik; Arena Demokratisasi Ekonomi Lokal sebagai wujud Kedaulatan Ekonomi; dan pemberkuasaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif Warga *Kalurahan* sebagai wujud Kedaulatan Data. Kesemuanya yang tertera itu, hendaknya janganlah hanya berhenti pada teks tanpa konteks.

(DATA 6)

Pada kalimat di atas, Sri Sultan HB X terlihat menunjukkan identitas baik sebagai kepala daerah dan raja yang memiliki kekuasaan baik pemerintahan maupun budaya, yang menginginkan kemajuan untuk rakyat Yogyakarta.

Diskursus

Teks dibuat melalui kerja diskursus atau wacana yang akan produksi suatu teks (Eriyanto, 2002). Dimensi diskursus memfokuskan pada proses penyebaran teks, produksi teks, dan konsumsi teks. Pidato diselenggarakan pada acara *Sapa Aruh* Sri Sultan HB X dalam peringatan satu dasawarsa keistimewaan yang juga ditayangkan di saluran youtube pemerintah provinsi DIY.

Yogyakarta mendapatkan status keistimewaan secara lengkap berdasarkan UU no. 13 tahun 2012. Berdasarkan undang-undang tersebut, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam hal pengisian jabatan, kepala daerah, kelembagaan pemerintahan, serta kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Yogyakarta pun mendapatkan dana keistimewaan untuk mendanai kewenangan. Pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta, hal yang ditekankan oleh Sri Sultan HB X adalah budaya dan ekonomi. Aspek budaya, tradisi, adat istiadat di tengah modernisasi dan globalisasi menjadi perhatian serius bagi kepala daerah dan jajarannya. Memang salah satu hal yang patut diapresiasi seperti oleh Keraton Yogyakarta yang saat ini memiliki media sosial baik instagram maupun youtube cukup aktif bahkan memproduksi film-film yang memuat tradisi atau budaya Jawa khususnya Yogyakarta.

Namun seiring zaman yang dinamis dan terjadinya arus modernisasi yang terus menerus terjadi, perlu upaya yang konsisten dan matang dari semua pihak untuk menjaga budaya dan tradisi agar tetap lestari, tidak terpinggirkan dan bahkan dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada upaya serius, matang, konsisten, mungkin lambat laun budaya, adat istiadat, tradisi akan dianggap kuno bahkan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pidato tersebut, Sri Sultan HB X beberapa kali menyebutkan kata *kita*, yang berarti bahwa Sri Sultan HB X menyadari bahwa jika hanya ia sendiri maka tidak akan mampu mewujudkan upaya-upaya dalam aspek budaya maupun ekonomi sebagaimana tujuan keistimewaan bagi Yogyakarta.

Rangkaian produksi teks pidato ini dihasilkan oleh Sri Sultan HB X, tim pemerintah daerah Yogyakarta, maupun abdi dalem kesultanan. Teks ini kemudian dibacakan menjadi pidato resmi oleh Sri Sultan HB X yang memiliki kekuasaan politik dan budaya untuk

mengajak, menginstruksikan maksud dan pesan agar ditaati, dilaksanakan secara nyata.

Praktik Sosial Budaya

Konteks sosial di luar pidato / teks pidato yang diucapkan akan memengaruhi wacana yang muncul pada pidato atau teks pidato yang dibacakan tersebut. Praktik sosial budaya ini memiliki berapa tingkat dalam analisis wacana kritis untuk penelitian ini. Haryatmoko (2016) mengatakan praktik sosial budaya memiliki beberapa tingkatan. Tingkat situasional terkait produksi wacana dan situasinya, tingkat institusional terkait institusi dan pengaruhnya, dan tingkat sosial sehubungan dengan situasi seperti budaya, politik, maupun ekonomi. Tingkatan tersebut berpengaruh terhadap wacana yang ada.

Situasional

Menurut Halliday (dalam Santoso, 2008), hakikat bahasa adalah bentuk tindakan. Tindakan menghasilkan atau mengucapkan suatu teks sesuai dengan kondisi atau suasana tertentu. Menurut Eriyanto (2015) tindakan tersebut ialah respon konteks sosial. Konteks situasional pada penelitian ini merujuk pada situasi peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta. Pidato Sri Sultan HB X terkait konteks situasi pidato yang mengajak, menginstruksikan agar terlaksana upaya dan tindakan partisipatif terutama dalam aspek pelestarian dan modernisasi budaya, tradisi, adat istiadat serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada teks pidato berikut.

Dan dalam upaya meningkatkan marwah Keistimewaan di usia Dasawarsa-nya, perlu bagi kita untuk memperingati UUK DIY dengan berpikir reflektif. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan segenap rakyat DIY dalam basis budaya, melalui penguatan upaya-upaya partisipatif-demokratis, menuju tataran “Pancamulia”, selaras dengan agenda prioritas Reformasi *Kalurahan*, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

(DATA 3)

Sri Sultan HB X mengajak, menginstruksikan agar semua pihak turut memajukan kondisi ekonomi berbasis budaya bagi warga Yogyakarta. Tentunya upaya-upaya yang disebutkan di atas dengan program-program kerja yang dicetuskan, perlu diaktualkan dengan matang dan konsisten sampai tujuan akhir benar-benar tercapai, tidak berhenti hanya pada tatatan pemikiran atau konsep belaka.

Intitusional

Pada tingkat ini, organisasi berpengaruh pada produksi wacana, organisasi yang dimaksudkan dapat berupa institusi resmi ataupun institusi sosial. Pidato Sri Sultan HB X dalam peringatan satu dasawarsa keistimewaan ini dilaksanakan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta yang merupakan bagian kompleks pusat pemerintahan provinsi DIY dan ditayangkan juga secara daring melalui saluran youtube pemerintah provinsi DIY. Organisasi pada tingkat institusional secara resmi berasal dari Sri Sultan HB X dan Pemerintah Provinsi DIY, dan mungkin terdapat pengaruh juga dari institusi sosial budaya Keraton Kesultanan Yogyakarta.

Sosial

Yogyakarta berstatus sebagai daerah istimewa memiliki antara lain lima keistimewaan. Hal tersebut antara lain dalam pengisian jabatan gubernur oleh Sri Sultan dan wakil gubernur oleh KGPAA Paku Alam, termasuk juga kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur kelembagaan pemerintah daerahnya. Dalam bidang kebudayaan, UU Keistimewaan mengatur wewenang dan kekuasaan dalam hal kebudayaan. Selanjutnya yang

menjadi keistimewaan Yogyakarta adalah pertanahan. Di Yogyakarta terdapat tanah milik kerajaan yaitu *tanah kasultanan* dan *tanah kadipaten*. Dalam hal tata ruang pun, Kasultanan dan Kadipaten memiliki hak menetapkan kebijakan tata ruang sesuai dengan keistimewaan DIY.

UU Keistimewaan melegitimasi sosok Sri Sultan HB X baik posisinya sebagai gubernur ataupun raja, dan menjadikan Sri Sultan merupakan pimpinan tertinggi di DIY baik secara pemerintahan maupun secara kebudayaan. Selain itu juga memiliki kewenangan secara ekonomi, hal ini antara lain pengaturan tanah Kesultanan oleh institusi Keraton Yogyakarta kepada masyarakat atau institusi yang akan memanfaatkan tanah tersebut. Tilman dkk. (2021) menjelaskan bahwa dalam penggunaan tanah Keraton, maka masyarakat memerlukan izin Keraton Yogyakarta melalui *serat kekancingan*. *Serat kekancingan* ini untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Keraton Yogyakarta yang memiliki peran sosial budaya mengakar kuat di DIY, dan adanya UU Keistimewaan semakin meneguhkan bahwa sosok Sri Sultan HB X memiliki legitimasi yang tinggi baik sebagai raja ataupun gubernur.

PENUTUP

Pidato Sri Sultan HB X pada peringatan satu dasawarsa keistimewaan Yogyakarta dalam pandangan wacana kritis Fairclough memiliki aspek dimensi teks, praktik wacana, dan juga sosial budaya. Pada aspek teks, Sri Sultan HB X ingin meneguhkan pengaruh institusi Keraton Yogyakarta. Sri Sultan HB X juga bermaksud menggambarkan bahwa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki kelayakan hidup yang baik dilihat dari aspek harapan hidup, kebahagiaan, dan pendidikan. Pada aspek praktik diskursus, Sri Sultan HB X terlihat menunjukkan identitas yang baik dan luhur serta peduli terhadap Yogyakarta yang merepresentasikan posisinya sebagai kepala daerah dan raja yang memiliki kekuasaan baik pemerintahan maupun budaya. Sedangkan pada praktik sosial budaya, pidato terkait peringatan keistimewaan Yogyakarta yang mengusung tema budaya termasuk di dalamnya pendidikan, serta ekonomi yang merepresentasikan pemikiran Sri Sultan HB X untuk menata kebijakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, E. S., & Ahmadi F, Y. (2021). Analisis Kesalahan Diksi dan Gaya Bahasa Pidato Pejabat Pemerintahan Berkaitan dengan Pandemi Covid-19. *Semantik*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.22460/semantik.v10i1.p77-86>
- Afriansyah, A. (2017). Bahasa Sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1), 99–106. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.686>
- Akmaluddin, S. (2019). Kuasa Bahasa dalam Wacana Perkuliahan. *Mabasan*, 13(2), 111–136. <https://doi.org/10.26499/mab.v13i2.251>
- Apriliani, R. (2022). Critical Discourse Analysis Norman Fairclough Pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Merespon Pandemi COVID-19. *IMPRESI*, 3(2), 30–41. Retrieved from [https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/Riski Apriliani/pdf](https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/Riski%20Apriliani/pdf)
- Aswadi. (2018). Mengulik Akar Kritis dalam Analisis Wacana Kritis dan Implementasinya Terhadap Teks Berita. *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, Dan Budaya*, 8(2), 176–188. Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/lensa/article/download/3214/pdf>
- Ayuningtias, D. I., & Hartanto, E. Ci. S. (2014). Pidato Politik di Indonesia: Sebuah Kajian Wacana Kritis. *Prosodi*, VIII(1), 25–38. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/prosodi/article/view/284/263>
- Busri, H. (2009). Representasi Kebahasaan dalam Teks Berita Surat Kabar (Sebuah Analisis

- Wacana Kritis). *Diksi*, 16(1), 19–31. <https://doi.org/10.21831/diksi.v16i1.6565>
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, N. (1996). *Language and Power*. London: Longman Group UK Limited.
- Francesconi, D., & Tarozzi, M. (2019). Embodied Education and Education of the Body: The Phenomenological Perspective. *Phänomenologische Erziehungswissenschaft*, 8(June), 229–247. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25517-6_12
- Haryatmoko. (2016). *Analisis Wacana Kritis: Landasan Teori, Metode, Penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Helena, W. M., Yulianto, B., & Kisyani. (2021). Pidato Nadiem dalam Seri Merdeka Belajar : Analisis Wacana Kritis Situasi Sosial dan Ideologi (Perspektif Teori Analisis Wacana Kritis). *Jurnal Education and Development*, 9(2), 220–224. Retrieved from <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2557/1481>
- Humas DIY. (2023). AHH Tertinggi Di Indonesia, Kemiskinan DIY Masih Menjadi PR. Retrieved from <https://jogjaprov.go.id/berita/ahh-tertinggi-di-indonesia-kemiskinan-diy-masih-menjadi-pr>
- Kristianto, R., & Kuswarsantyo. (2020). Perbandingan Beksan Lawung Ageng dalam Pernikahan Agung Tahun 2013 dengan Peringatan 30 Tahun Bertahta Sri Sultan Hamengku Buwono X Tahun 2019 di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat : Kajian Aspek Makna, Bentuk, dan Fungsi. *Jurnal Seni Tari*, 9(1), 65–75. <https://doi.org/10.15294/JST.V9I1.39433>
- Luhukay, M. S. (2007). Presiden SBY dan Politik Pencitraan : Analisis Teks Pidato Presiden SBY dengan Pendekatan Retorika Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Scriptura*, 1(2), 51–70. <https://doi.org/10.9744/scriptura.1.2>
- Mills, S. (2004). *Discourse*. London: Routledge.
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(2), 96–105. Retrieved from file:///D:/JURNAL PENELITIAN/Jurnal Genap 2022-2023/Untuk Revisi/1319-Article Text-2110-1-10-20211014.pdf
- Santoso, A. (2008). Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis. *Bahasa Dan Seni*, 36(11), 1–14.
- Supradi, Simanjuntak, B., & Yusrah. (2020). Analisis Wacana Kritis Pidato Nadiem Makarim 2019. *Jurnal Sintaksis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS Dan Bahasa Inggris*, 2(2), 71–78. Retrieved from <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/Sintaksis/article/view/126/135>
- Surahman, S. (2020). Globalisasi, Modernisasi, dan Paugeran di Kesultanan Yogyakarta. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 292–307. <https://doi.org/10.31947/kareba.vi.8676>
- Tamrin, A.-. (2019). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Terhadap Pidato Gubernur Anies Baswedan Tentang Ungkapan Kata “Pribumi.” *Al-Munzir*, 12(2), 301–320. <https://doi.org/10.31332/am.v12i2.1484>
- Thontowi, J. (2019). Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *UIR Law Review*, 3(01), 1–19.

[https://doi.org/10.25299/uirrev.2019.vol3\(01\).3413](https://doi.org/10.25299/uirrev.2019.vol3(01).3413)

Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>

Triyanto, Fauziah, F. A., & Hadi, M. T. (2019). Bahasa Sebagai Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa. *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v1i1.1145>